



NAZHARAT:
JURNAL KEBUDAYAAN
Vol. 31 No. 02, Desember 2024



DI TENGAH REVOLUSI KEMERDEKAAN: RESTORASI KESULTANAN JAMBI DAN PERSATUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ali Muzakir

*Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
muzakir_adab@uinjambi.ac.id*

Abstract

This research aims to analyze the dynamics of social and political history during the independence revolution in Jambi. This research is a historical analysis of the interaction between the Jambi people in the region and the central government as recorded in various historical references. The flow of history is described chronologically. Therefore, local historical references are also highly appreciated because they have recorded events in more detail. This paper shows that the history of events in Indonesia's regions is an integral and decisive part of the struggle through which the country gained its independence. The case of Kertapati who wanted to restore the sultanate's aspirations and political dynamics during the revolution.

مستخلص

البحث

Abstract

Keywords: *revolusi kemerdekaan, restorasi kesultanan, Raden Inoe Kertapati, Jambi, Hatta*

كلمات

أساسية

Keyword

1. INTRODUCTION (مقدمة)

Revolusi kemerdekaan adalah perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Negara Indonesia yang baru terbentuk memiliki latar belakang yang sangat beragam letak geografis, latar budaya, asal-usul etnis, suku, dan agama (Sukarno, 2014: 14). Menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman tersebut sangat penting karena Belanda masih ingin menjajah Indonesia kembali, terbukti dengan melakukan Agresi Militer I pada 20 Juli 1947 dan II pada 19 Desember 1948. Meskipun telah dilakukan perundingan Linggarjati dan Renville, tampak sekali, meskipun secara *de facto* mengakui Indonesia, Belanda masih berupaya untuk memecah belah negara kesatuan. Pejabat Gubernur Jenderal Belanda yang terakhir, H. J van Mook, menawarkan penggabungan negara Indonesia dengan Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda (Poeze, 2024: 137; Kahin, 1995: 2). Reid (2011: viii) menyebutnya sebagai revolusi kebangsaan (*national revolution*) yang dari sebuah negara-bangsa yang baru terbentuk melalui perjuangan anti-kolonial. Karena itu, tanpa ada

dukungan dari pemimpin-pemimpin daerah, kecil kemungkinan pemerintah pusat menghadapi tekanan Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali.

Soekarno dan Hatta dalam berbagai kunjungan ke daerah sangat menekankan pentingnya menjalankan pemerintahan sipil yang baru terbentuk ke dalam kesatuan *nation-state* (Formichi, 2012: 79). Karena kondisi masing-masing daerah yang bervariasi, sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum mapan, beberapa daerah di Sumatra dan Kalimantan masih dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin lokal-tradisional yang belum sepenuhnya memahami politik *nation-state*. (Kahin, 1995: 1-2). Hal ini tampak pada kasus Raden Inoe Kertapati di Jambi yang memiliki pandangan politik pro-kesultanan dari pada negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan penelusuran dokumen-dokumen sejarah, tercatat bahwa Kertapati lebih condong untuk merestorasi Kesultanan Jambi yang terpisah dari republik. Kertapati segera mengambil langkah politik yang berani dengan mencari dukungan Belanda. Selain Jambi, beberapa kesultanan lainnya juga mengambil langkah politik pro-kesultanan (<https://www.uisu.ac.id/opini-dosen-revolusi-sosial-di-kesultanan-langkat-dahlana-sari-marbun/>). Untuk itu, tulisan ini akan menganalisis faktor-faktor sosial-politik yang melatarbelakangi sikap politik Kertapati. Sikap anti-republik Kertapati secara tepat diantisipasi oleh Wakil Presiden Moh. Hatta.

2. THEORETICAL FRAMEWORK (نظريات)

2.1 Ragam Revolusi Kemerdekaan

Kajian tentang revolusi kemerdekaan yang berlangsung antara tahun 1945-1950 telah banyak dilakukan oleh para peneliti dalam dan luar negeri (Anderson, 2006; Kahin, 2003; Kahin, 1985; Reid, 1979). Tahun 1980-1990, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan laporan-laporan tentang sejarah revolusi di berbagai provinsi (Wiyono dkk., 1991; Enar dkk., 1978; Anonim, 1978). Hampir setiap daerah telah memiliki kajian-kajian yang menceritakan kisah-kisah kepahlawan yang muncul selama revolusi kemerdekaan. Direktorat Sejarah melakukan inventarisasi dan kronologi *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jambi* (Zainuddin, 1979/1980). Namun buku terakhir ini hanya mengungkap peristiwa-peristiwa sejarah kronologis dan tematis. Dinamika dan gagasan politik dari warisan Kesultanan Jambi tidak dibahas.

Pemerintahan kesultanan memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan kelembagaan politik Barat. Kesultanan adalah lembaga pemerintahan yang memandang penguasanya sebagai idealis. Sultan memiliki kekuatan magis dan mewarisi kekuatan adi kodrati. Karena itu rakyat memiliki pengharapan yang sangat tinggi akan kemakmuran dan citra diri para penguasa sebagai penghubung alam makokosmos dan mikrokosmos. Penguasa melegitimasi dirinya memiliki akar historis dan silsilah yang masyhur (Milner, 1982; Gullick, 1982). Bangsa-bangsa Eropa yang berhasil menguasai suatu kesultanan, mereka sangat memandang rendah konsep kepemimpinan tradisional Melayu. Karena itu, mereka memperkenalkan dan memaksakan lembaga pemerintahan yang rasional dan sekular.

Di masa-masa awal revolusi kemerdekaan terjadi gejolak social yang mempertajam identitas etnis dan suku. Beberapa pemimpin tradisional ingin tetap dihargai sebagai bagian dari elit administrasi pemerintahan (Kartodirdjo, 1982: 118). Sebagai lembaga pemimpin tradisional yang historis, kesultanan secara kuat tertanam di dalam kolektif memory orang-orang Melayu. Karena itu situasi buruk sedang berlaku, maka ide untuk merestorasi kesultanan muncul kembali. Ide restorasi kesultanan pernah muncul di Aceh pada 1939. Pada dasarnya Dewan Rakyat (Volksraad) di Batavia mendukung gagasan tersebut untuk mengurangi friksi di kalangan internal pemimpin

adat (uleebalang) dan keturunan keluarga sultan Aceh. Reid (1979: 28) menyebut bahwa gerakan di masa revolusi telah mengakhiri pemimpin-pemimpin tradisional.

Meskipun telah banyak dilakukan kajian untuk menjelaskan revolusi kemerdekaan, namun sejumlah besar pertanyaan belum terjawab, karena kajian tentang revolusi terlalu Jawa-sentris. Padahal peristiwa tersebut terjadi secara simultan dalam lingkup nasional maupun regional (Joshua, 2018: 72). Blackburn (2010: 5) menyebut banyak negara di Asia Tenggara yang mempunyai sejarah yang dikembangkan dalam beberapa decade untuk berbagi pengalaman penderitaan dan resistensi sebagai bagian dari proses pembentukan bangsa. Beberapa pemberontakan di daerah memiliki akar dalam hubungan antara Tentara Nasional dan kelompok-kelompok perang gerilya, sebagai bentuk perluasan kontrol pemerintah pusat. Pemerintah Republik terus berupaya untuk mengontrol provinsi-provinsi (daerah) dan pemimpin-pemimpin lokal untuk menghindari gerakan-gerakan yang membahayakan persatuan. Menurut Aspinall (2009), beberapa bentuk ketegangan antara politik nasional dan daerah, ikatan-ikatan yang kompleks dalam etnisitas, dan lingkungan sejarahnya memiliki akar yang kuat dengan wawasan keislaman.

2.2 Relasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Meskipun telah banyak dilakukan kajian untuk menjelaskan revolusi kemerdekaan, namun sejumlah besar pertanyaan belum terjawab, karena kajian tentang revolusi terlalu Jawa-sentris. Padahal peristiwa tersebut terjadi secara simultan dalam lingkup nasional maupun regional (Joshua, 2018: 72). Blackburn (2010: 5) menyebut banyak negara di Asia Tenggara yang mempunyai sejarah yang dikembangkan dalam beberapa decade untuk berbagi pengalaman penderitaan dan resistensi sebagai bagian dari proses pembentukan bangsa. Beberapa pemberontakan di daerah memiliki akar dalam hubungan antara Tentara Nasional dan kelompok-kelompok perang gerilya, sebagai bentuk perluasan kontrol pemerintah pusat. Pemerintah Republik terus berupaya untuk mengontrol provinsi-provinsi (daerah) dan pemimpin-pemimpin lokal untuk menghindari gerakan-gerakan yang membahayakan persatuan.

Sebagian besar para pemimpin di pusat, apa pun afiliasi politik mereka, mengadopsi apa pola pikir pragmatis bahwa bahwa pencapaian kemerdekaan harus didahului oleh restrukturisasi masyarakat Indonesia. Dalam upaya mencegah atau berusaha menekan revolusi lokal meletus di banyak daerah di Jawa dan Sumatra ketika Jepang mundur, para pemimpin Republik sangat takut akan kekacauan yang mungkin timbul dari pemberontakan semacam itu; mereka juga disibukkan dengan menunjukkan kepada kekuatan Sekutu (terutama Inggris dan Amerika Serikat) bahwa Republik Indonesia mampu memerintah nusantara yang luas. Para pemimpin nasionalis yang berpendidikan Barat khawatir bahwa kekerasan yang tidak terkendali, selain berpotensi memusuhi opini internasional yang simpatik, bisa merusak sistem sosial yang banyak elemennya ingin mereka pertahankan. Dalam pandangan mereka, jika negara Indonesia yang merdeka akan berfungsi secara efektif, negara ini membutuhkan pelayanan dari para pejabat administratif dan teknis yang berpengalaman. Pejabat-pejabat yang yang paling memenuhi syarat telah dilatih oleh Belanda, dan sebagian besar sebagian besar telah mempertahankan jabatan mereka di bawah Jepang. Para pemimpin Republik, kemudian, melihat pemecatan dini terhadap pejabat-pejabat daerah kemungkinan besar akan melemahkan kohesi nasional dan kekuatan ekonomi yang diperlukan untuk menghadapi kekuatan Belanda secara yang paling efektif (Kahin, 1985: 13).

3. METHOD (طريقة \ منهج البحث)

Tulisan ini memahami dinamika gerakan revolusi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, yang fokus pada beberapa bentuk gagasan dan tindakan dari proses revolusi di

Jambi. Secara metodologis tulisan ini adalah kajian sejarah lokal, dengan melakukan pencarian dan pengumpulan sumber bahan (*heuristic*) terutama sumber tertulis, serta melakukan studi perpustakaan (*library research*). Peristiwa lokal di Jambi pada masa revolusi kemerdekaan dikaitkan dengan proses politik, perbedaan politik, peran sumber daya lokal dan kategori budaya. Karena referensi lokal sangat diandalkan karena memuat catatan peristiwa lebih detail, misalnya karya Soedarsono, *Sejarah Perjuangan Daerah Jambi dan Sekitarnya* (1975) dan Nasruddin, *Jambi dalam Sejarah Nusantara* (1989). Salah satu kekuatan sumber-sumber lokal adalah memiliki sekuel dan kronologi suatu peristiwa. Pembahasan bersifat daerah (*regiosentris*) untuk mendapatkan peranan dan kegiatan masyarakat daerah Jambi di masa revolusi kemerdekaan.

4. FINDINGS & DISCUSSION (بحث ومناقشة)

4.1. Dari Kesultanan ke Karesidenan: Dampak Sosial dan Politik

Kepemimpinan sultan yang berlangsung hampir empat ratus tahun diambil alih oleh Belanda pada tahun 1901. Pengambilalihan tersebut telah dimulai dengan mendesak Sultan Thaha Saiffuddin, yang naik tahta pada Oktober 1855, untuk melakukan perundingan tentang kontrak baru antara Jambi dan Belanda. Akan tetapi Sultan Thaha menolak untuk bertemu dengan Residen P. T Couperus yang menaawarkan pembaruan kontrak yang dahulu pernah ditandatangani oleh Sultan Fakhruddin di tahun 1833. Sultan Thaha menilai pasal-pasal kontrak yang telah diperbarui tersebut sangat merugikan Jambi (Locher-scholten, 2004: 118-119; Meng, t. th.: 9). Sultan Thaha berprinsip bahwa ia adalah sultan yang baru, karena itu ia tidak ada hubungannya dengan kontrak sebelumnya. Sultan Thaha ingin menjaga kedaulatan Jambi dari intervensi Belanda.

Setelah menolak beberapa kali mediasi dan bujukan, kraton Sultan Thaha diserang oleh Belanda pada 6 September tahun 1858. Karena kalah persenjataan dan strategi Belanda yang lebih terlatih, Sultan Thaha terpaksa meninggalkan ibu kota Jambi menuju ke pedalaman antara Tembesi dan Tebo, di sana ia melanjutkan perjuangan menentang Belanda. Ketidakhadiran Sultan Thaha di ibu kota dinilai oleh Belanda sebagai bentuk kekosongan pemerintahan. Karena itu Belanda menuntut pelantikan sultan baru untuk melanjutkan perpanjangan-perjanjian yang pernah disepakati. Sultan baru yang akan dilantik harus mau berunding dan bekerja sama dengan Belanda. Di saat Sultan Thaha masih terus berjuang, dilantiklah tiga sultan baru, yaitu Ahmad Nazaruddin (berkuasa 1858-1881), Muhammad Mahiddin (1882-1886), dan Ahmad Zainuddin (1886-1901). Di mata masyarakat, Sultan Thaha adalah sultan yang paling sah dan dihormati. Sultan-sultan baru tersebut dinilai pemimpin yang lemah dan disebut “sultan bayang” karena otoritas mereka di bawah bayang-bayang Sultan Thaha. Dalam praktiknya, setiap akan diadakan perundingan Belanda tetap menginginkan kehadiran Sultan Thaha (Locher-scholten, 2004: 137).

Pelantikan sultan-sultan baru juga dinilai telah menyalahi hierarki kepemimpinan, di mana sultan yang dilantik lazimnya adalah anak dari sultan sebelumnya dan telah ditetapkan sebagai Pangeran Ratu (MS., *Ini Sajarah Kerajaan Jambi*, t. th.: 7). Selain itu, tampak juga ketidaksiapan mereka yang terlihat dari faktor umur dan kondisi fisik. Salah satunya adalah yang menimpa Sultan Ahmad Zainuddin, yang terpaksa mengundurkan diri pada 1901 karena faktor usia dan kesehatan. Papatih dalam sempat mengadakan rapat untuk menentukan penggantinya tetapi tidak dicapai kesepakatan. Di tengah vakum kepemimpinan di ibu kota, Sultan Thaha sempat menunjuk anaknya, Pangeran Anom Kesumo Judo sebagai calon penggantinya. Karena usianya masih sebelas tahun, maka penetapannya ditunda. Di tengah kekosongan jabatan sultan, Belanda segera bertindak cepat dengan mengambil alih pemerintahan. Belanda menilai posisi kesultanan telah sangat lemah. Tanda-tanda tersebut semakin nyata ketika Pangeran Ratu Marta Ningrat (Pangeran Anom Kesumo

Judo) yang mewakili kesultanan menyerahkan pusaka Keris Siginjei dan Singa Merjaya kepada Belanda pada 26 Maret 1904, Sultan Thaha terbunuhnya 26 April 1904, pembuangan anak-anak raja dan pelucutan daerah-daerah pegangan mereka (Locher-scholten, 2004: 137). Dengan demikian, sistem kepemimpinan tradisional yang telah berlangsung 400 tahun akan berakhir.

Untuk sementara, secara administratif Jambi diserahkan ke Karesidenan Palembang. Kerinci yang dikuasai oleh Belanda pada tahun 1903 digabungkan ke Karesidenan Sumatra Barat. Akhirnya pada 2 Juli 1906, Belanda secara resmi menyatakan Kesultanan Jambi telah berakhir dan membentuk karesidenan tersendiri yang terpisah dari Palembang. Karesidenan merupakan pemerintahan yang seragam. Agar tidak tertinggal dari karesidenan lainnya di Sumatra, Belanda mulai membangun infrastruktur transportasi, komunikasi, penerangan, air bersih, pendidikan dan perkantoran (Zulqaiyyim, 2019: 152). Untuk menata kependudukan, Belanda memperkenalkan sistem marga, yang dibentuk dari masyarakat adat dan dusun-dusun yang telah ada sejak masa kesultanan. Marga menjadi struktur pemerintahan terendah di sebuah karesidenan. Setiap marga dipimpin oleh pasirah. Sistem ini meniru struktur pemerintahan yang sebelumnya telah dibentuk di Palembang, Bengkulu, dan Lampung. Jambi dibagi menjadi 2 *afdeeling* (setingkat kabupaten), yaitu Jambi ulu yang meliputi Bungo, Merangin, Sarolangun, dan Bangko, dan Jambi ilir yang terdiri dari Tembesi, Jambi, dan Tungkal. *Afdeeling* dipimpin oleh demang dan dibantu oleh seorang asisten (Zulqaiyyim, 2019: 152; Zainuddin, 1985: 44-45).

Walaupun tidak secara menyeluruh, kepemimpinan marga telah merubah sistem kepemimpinan tradisional yang sebelumnya berlaku di masyarakat. Banyak kepala-kepala dusun yang berpihak kepada Sultan Thaha diganti. Untuk memudahkan pendataan administrasi, dibentuklah beberapa unik distrik baru yang berasal dari penggabungan atau pecahan dusun. Distrik baru tersebut telah memecah kesatuan masyarakat adat dan hubungan genealogis keluarga. Masyarakat Jebus dibagi dua, yaitu Jebus dan Dendang; begitu pula Maro Sebo menjadi Maro Sebo Hulu, Maro Sebo Hilir, dan Maro Sebo Tengah. Pada tahun 1912, sekira 83 dusun disederhanakan menjadi 28 distrik. Sebelumnya, masyarakat adat dan dusun-dusun tersebut adalah daerah “pegangan” anak-anak raja (pangeran) yang ditunjuk oleh Sultan Thaha. Anak-anak raja tersebut telah ditangkap oleh Belanda, dan sebagian lainnya secara sukarela menyerahkan “pegangan” mereka kepada Belanda (Locher-scholten, 2004: 230-234). Dengan demikian, sistem karesidenan membuat dusun-dusun semakin kuat tercerabut dari akar kepemimpinan tradisional mereka.

Untuk menjalankan administrasi karesidenan, Belanda sangat membutuhkan pegawai-pegawai rendah dan pejabat-pejabat lokal yang berasal dari penduduk setempat, yang minimal mampu baca dan tulis. Maka, membuka sekolah merupakan kebutuhan untuk memenuhi korps pegawai. Pada tahun 1907, Belanda memerintahkan kepada setiap marga membuka sekolah (*volkschool*), yang lama belajarnya selama tiga tahun. Untuk pembiayaannya, Belanda menetapkan pajak f. 0.50 kepada setiap kepala keluarga, baik baik yang mempunyai anak usia sekolah maupun tidak. Pada tahun 1915, tiga puluh delapan sekolah rakyat telah berdiri (Locher-scholten, 2004: 283; Muttalib, 1980: 30). Namun dalam pelaksanaannya, banyak para orang tua menolak untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Mereka menilai sekolah bergaya Belanda akan merusak keyakinan agama dan menyebabkan kekafiran. Guru-gurunya dipandang orang asing karena bukan orang Jambi. Para-orang tua juga takut anak-anak mereka akan dibawa ke tempat lain jika telah tamat sekolah. Pandangan-pandangan negatif tersebut membuat persentase kehadiran murid tidak lebih dari 50 persen. Tidak jarang, dibantu oleh polisi, beberapa demang dengan berbagai rayuan dan paksaan meminta anak-anak untuk datang ke sekolah. Beberapa kepala dusun dipecat karena tidak mampu meningkatkan persentase kehadiran yang ditargetkan hingga mencapai 90 persen (Muttalib, 1980: 50; Zainuddin, 1980/1981: 32-33).

Sentimen antik kafir kepada sekolah-sekolah Belanda semakin menguat ketika beberapa ulama Jambi yang baru pulang dari Mekkah mendirikan tiga madrasah (Nurul Islam, Nurul Iman, Sa`adatud Daren) secara hampir bersamaan di Kampung Pecinan pada tahun 1915. Menyusul setelah itu Jawharen di Kampung Pasar, dan kemudian dipindahkan ke Pecinan pada tahun 1927. Madrasah-madrasah tersebut didirikan ulama-ulama yang telah terafiliasi gerakan revivalisme Islam (kebangkitan umat). Karena itu, meskipun madrasah-madrasah tersebut terpusat di Pecinan, yang sekarang dikenal Kampung Seberang, murid-muridnya sangat banyak yang datang dari berbagai pelosok Jambi (Muzakir, 2017: 10; Bafadhal 2008). Tingginya minat pada madrasah membuat membuat tujuh belas sekolah-sekolah marga tutup pada tahun 1932 (Tideman, 1938: 121). Pemerintah berupaya memanfaatkan tokoh adat untuk meningkatkan minat pada sekolah-sekolah bergaya Belanda, tetapi mereka juga sangat lambat mengikuti program-program politik etis. Pada umumnya, tokoh-tokoh adat tidak mengerti baca dan tulis; tercatat hanya 7,3 persen penduduk yang melek huruf, karena itu belum ada surat kabar local di Jambi (Locher-scholten, 2004: 283).

Pada tahun 1934, Belanda mulai membuka sekolah-sekolah yang lebih formal, yaitu Europeesche Lagere School (ELS) yang khusus untuk anak-anak keturunan Eropa. Setelah itu menyusul Hollandsche Inlandsche School (HIS). HIS membuka peluang terbatas kepada penduduk pribumi untuk belajar. Namun dari 160 murid hanya 23 yang asli orang Jambi. Untuk meningkatkan afiliasi HIS pada penduduk pribumi, pada tahun 1936 kepala sekolahnya diserahkan kepada Raden Momon Wirakesuma dari Bandung. Wirakesuma diharapkan lebih komunikatif kepada tokoh-tokoh adat dan agama. Pembukaan sekolah bergaya Belanda juga dikembangkan oleh Yayasan Theresia yang berorientasi Kristen dan sekolah Cina (*Hollandsche Chineesche School*). Namun untuk lanjut HIS, yaitu Meer Uitgebreid voor Lager Onderwijs (MULO) belum didirikan di Jambi. MULO merupakan pendidikan setingkat SMP saat ini, di di Sumatra baru ada di Bukit Tinggi, Palembang, dan Medan (Nasruddin, 1989: 342).

Masih rendahnya minat pribumi pada sekolah mempersulit Belanda untuk mendapatkan tenaga administrasi dari penduduk lokal. Akhirnya Belanda mengangkat orang-orang dari luar Jambi sebagai pejabat daerah, khususnya dari Palembang dan Minangkabau. Pada tahun 1936, terdapat tujuh demang hanya dua orang dari asli Jambi dan tiga orang asisten yang berasal dari penduduk setempat (Locher-scholten, 2004: 283; Muttalib, 1980: 27). Demang yang paling terkenal, misalnya Makalam (w. 1959), adalah keturunan Minangkabau-Bengkulu. Pada awalnya, ayahnya merantau ke Kerinci. Setelah itu pindah ke Dusun Sekaladi, Batang Asai. Makalam lahir di Sekaladi pada tahun 1889. Adiknya, Ali Sudin, adalah juru tulis (klerek) di kantor *controleur* karesidenan. Dua anaknya M. Kamil dan Abundjani dikirim ke sekolah Belanda *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) di Palembang. Setelah tamat dari MULO, kakak beradik tersebut melanjutkan pendidikan ke *Middelbare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaar* (MOSCVIA). Namun keduanya dimasukkan secara terpisah, Kamil terlebih dahulu berangkat ke Magelang sedangkan Abundjani menyusul setahun kemudian, tetapi Bandung (Zaibaski, 2008: 102).

Pada zaman pendudukan Jepang, sekolah-sekolah Belanda ditutup. Jepang lebih berorientasi pada pendidikan militer. Untuk di Sumatra, Jepang membuka pendidikan militer *Gyugun* di Bukit Tinggi dan Pagar Alam. Setiap pemuda diperbolehkan untuk mendaftar. Akan tetapi untuk lolos seleksi berdasarkan pada dari latar belakang pendidikan (bisa baca-tulis) dan latar sosial-ekonomi keluarga. Tercatat sebelas orang pemuda dari Jambi terpilih untuk mengikuti *Gyugun* di Pagar Alam, Sumatra Selatan. Mereka adalah Abundjani (anak demang), Syamsul Malik (pelajar), M. Teguh (pelajar), Marzuki (pelajar), A. Rachman (pegawai), Ramli (pelajar), Said Abdullah (pelajar), Somad (pelajar), Ismail Arifin (pelajar), Sawitar (pelajar), dan Ibrahim (anak kepala marga). Di antara mereka adalah Abundjani yang pada masa revolusi kemerdekaan mencapai karir militer cemerlang. Ia diangkat sebagai komandan Sub-Territorial Djambi (STD),

dengan pangkat kolonel (Zed, 2005: 210; Halim, 2003: 35). Namun, Nasruddin (1989: 383) mencatat setidaknya 37 pemuda dari Jambi mengikuti pendidikan militer *Gyugun* di Pagar Alam. Setelah Indonesia merdeka, alumni *Gyugun* menjadi barisan utama pembentukan Tentara Nasional di Sumatra.

4.2. Politik Raden Inoe Kertapati: Jambi untuk Orang Jambi

Raden Inoe Kertapati memiliki pandangan politik yang sangat berorientasi kedaerahan. Sikap ini terbentuk karena ia merasa keturunan dari sultan Jambi. Ayahnya, Sultan Thaha, adalah sultan Jambi yang paling heroik dalam menentang kehadiran Belanda di Jambi. Ibunya bernama mbok Pipit dari Tebo (MS., Silsilah (Raja-raja) Jambi Or. 2304 f, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:2371844>). Namun ibunya bukanlah permaisuri yang utama. Selama konsolidasi kekuatan di ulu Jambi, Sultan Thaha menikahi beberapa wanita, sebagai salah satu strateginya memperkuat jaringan politik dengan keluarga-keluarga kesultanan yang menentang Belanda (Locher-scholten, 2004: 195-196). Dengan demikian Raden Kertapati berasal dari Suku Kraton, yang memegang hak utama silsilah sultan-sultan Jambi. Sayangnya, tidak banyak diketahui tentang tahun lahir dan kehidupannya di masa kecil. Setelah ayahnya dibunuh oleh Belanda tahun 1904, hampir seluruh keluarga dan kerabatnya ditangkap atau menyerahkan diri. Pada tahun 1905, Raden Kertapati diasing oleh Belanda ke Kediri. Tetapi ia beruntung karena Belanda tetap memperlakukannya secara baik. Kertapati diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan di sekolah rendah pemerintah Belanda di Jawa Barat. Setelah tamat pada tahun 1911, Raden Kertapati memilih untuk kembali ke Jambi dan diangkat sebagai pegawai yang mengawasi peredaran candu. Pada tahun 1919 sampai 1942 Raden Kertapati diangkat sebagai asisten demang di Rengat (Indragiri Hilir) dan kemudian dipindahkan ke Pauh dan Batang Asai. Residen Jambi menilainya sebagai pegawai yang jujur dan cakap dalam bekerja (Locher-scholten, 2004: 285; Nasruddin; 1989: 409; Soedarsono, 1975: 53).

Setelah sempat dijajah oleh Jepang dari tahun 1942-1945, berita kemerdekaan Indonesia sampai ke Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945. Berita tersebut disampaikan oleh A. K Gani, tokoh kemerdekaan dari Palembang, melalui telpon kepada R. Soedarsono, Kepala Buruh Minyak di Tempino. Selain itu, Syahril Rahman di Muara Tebo dan H. B Yahya di Muara Bungo juga mendengarnya melalui siaran radio luar negeri (Radio San Fransisco). Berita tersebut lalu disebarkan kepada tokoh-tokoh Jambi lainnya. Pada tanggal 20 dan 22 Agustus 1945, Abdullah Kartawirana, seorang pegawai di Jawatan Penerangan Jepang (*Hodohang*), segera mengumpulkan tokoh-tokoh Jambi di rumahnya di Jalan Masurai untuk mengambil sikap dan tindakan atas proklamasi. Pertemuan ini menghasilkan susunan pengurus Komite Nasional Indonesia (KNI) cabang Jambi, yang diketuai oleh dr. Sagaf Yahya dan wakilnya M. Kamil. Sagaf Yahya segera melaporkan susunan pengurus KNI kepada Gubernur Sumatra yang berpusat di Medan. Tanggal 3 September 1945, KNI mengadakan rapat umum di Gedung Nanpo - yang kemudian menjadi Bioskop Capitol, Duta, dan sekarang Hotel Duta. Rapat tersebut mengumumkan bahwa pemerintah pusat telah mengakui Sagaf Yahya sebagai Residen Jambi (Nasruddin, 1989: 391; Zainuddin, 1979/1980: 45; Soedarsono, 1975: 48).

Sagaf Jahja adalah seorang dokter dari Minangkabau. Sebelumnya ia dikenal sebagai tokoh politik Partai Indonesia Raya (Parindra) yang membuka cabang di Jambi. Karena pengalamannya tersebut, ia diharapkan mampu mengatur pemerintahan sipil dan menyejahterakan rakyat yang sangat menderita akibat pendudukan Jepang (Zed, 2005: 12). Namun, Sagaf Jahja menjabatnya hanya beberapa bulan. Ia mengundurkan diri karena alasan sakit. Selain diisukan sakit, sentimen non-Jambi adalah alasan yang kuat dihembuskan oleh kalangan tertentu. Ada yang meragukan kepemimpinan Sagaf Yahya akan dapat menyatukan masyarakat Jambi. Rapat tim komite pada Januari 1946 menyepakati Raden Kertapati yang saat itu sudah berusia enam puluhan untuk

menggantikan Sagaf Yahya. Sebagai putra Sultan Thaha, Kertapati mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Jambi. Hal ini membangkitkan kembali ingatan bersama (*collective memory*) di masa lalu pada era kesultanan. Kertapati segera menempati rumah bekas residen. Simbol-simbol kesultanan ditampilkan kembali. Untuk pengawalannya dibentuk kesatuan hulubalang yang dipimpin oleh Rd. Perang. Rd. Perang disebut pernah ditempa dalam pasukan Sultan Thaha (Nasruddin, 1989: 409, 416; Soedarsono, 1975: 50). Rakyat Jambi meyakini Raden Kertapati mewarisi kekuatan gaib yang akan membawa rakyat hidup lebih makmur dan sejahtera. Sebagai wakilnya ditunjuk R. M Utoyo, seorang keturunan Jawa dari Palembang, sedangkan Sagaf Yahya ditugasi sebagai kepala rumah sakit karesidenan (Locher-scholten, 2004: 286; Soedarsono, 1975: 52-53).

Mulai tanggal 4 Agustus 1947, Wakil Presiden Hatta mengunjungi kota-kota penting di Sumatra. Hatta menghadiri rapat-rapat umum bersama rakyat untuk menjelaskan makna kemerdekaan dan memantau situasi politik yang sangat dinamis di berbagai daerah. Ketika di Jambi, Hatta menginap di rumah Residen Kertapati (Soedarsono, 1975: 75). Di hadapan Kertapati, Hatta mendiskusikan situasi politik di Jambi. Hatta mendapat laporan bahwa Kertapati memiliki prinsip Jambi-sentris dan semboyan "Jambi untuk orang Jambi". Karena itu, Kertapati tidak menyukai penggabungan Jambi ke dalam Provinsi Sumatra Tengah, yang menjadikan Bukit Tinggi sebagai pusatnya (Locher-scholten, 2004: 286; Kementerian Penerangan, 1954: 123). Kertapati juga kurang menyukai banyaknya orang-orang dari Palembang, Minangkabau, dan Jawa, menduduki jabatan-jabatan penting di Jambi. Kertapati pernah digeser oleh R. M Utoyo, dari ketua dewan militer dan perwakilan rakyat; begitu pula dalam kehidupan sosial dan ekonomi lebih banyak dikontrol oleh non-Jambi. Pengusaha Cina menguasai ekspor karet; buruh dan pekerja tambang minyak berasal dari Jawa, sehingga muncul ungkapan "tanah pulang ke Jawa, pasar pulang ke Padang, uang pulang ke Cina" (Bafadhal, 1981/1982: 11). Untuk menetralsir kecemburuan sosial, pada Juli 1947 Hatta memenuhi sebelas jabatan yang diajukan Kertapati untuk orang Jambi; termasuk yang diganti adalah Utoyo yang dipindahkan ke Pekan Baru (Locher-scholten, 2004: 286).

Sentimen orang Jambi kepada Republik mudah dimanfaatkan karena sikap politik yang cenderung konservatif. Pada umumnya masyarakat Jambi memilih Partai Masyumi, dari pada Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin Soekarno. Isu yang sangat penting ini diperhatikan oleh Hatta yang mendapat laporan yang menyebutkan sikap politik Kertapati yang pro-kesultanan dari pada ke republik. Pada tahun 1946, dokumen Belanda menyebutkan Kertapati telah menghubungi Letnan Gubernur Jenderal H. J van Mook untuk mendukung sikap politiknya yang ingin terpisah dari Republik. Van Mook melakukan berbagai provokasi untuk memecah belah rakyat dengan rancangan negara federal khususnya di Sumatra dan Kalimantan. Antara bulan Oktober 1946 sampai Mei 1947, Kertapati beberapa kali mengutus seorang asisten untuk berunding dengan konsulat Belanda di Singapura. Belanda sempat memberi isyarat untuk mendukungnya. Pada Februari 1947, Kertapati diberi uang sepuluh ribu dolar Singapura untuk mendukung ambisinya (Locher-scholten, 2004: 286).

Karena hubungan ini, van Mook tidak menargetkan Jambi dalam agresi militer pertama di Sumatra pada 4 Juli-5 Agustus 1947. Selain faktor keberadaan Kertapati, van Mook mengenyampingkan untuk menyerang Jambi karena ladang minyak. Selain itu, kepentingan ekonomi pada ladang-ladang minyak menjadi pertimbangan penting; dikhawatirkan akan dibumihanguskan oleh pejuang Republik (Locher-scholten, 2004: 334; Soedarsono 1975: 78). Bahkan pada 5 Agustus 1947, konsulat Belanda mengundang Kertapati ke Batavia untuk membicarakan tindak lanjutnya. Namun karena persoalan politik Aksi Polisional dan Bersiap yang mendapat perhatian dunia internasional, Belanda tidak lagi memperdulikan rencana Kertapati (Locher-scholten, 2004: 287-288, secara khusus lihat pula catatan kaki nomor 88).

Di tengah tanpa ada perhatian lagi van Mook, Kertapati akhirnya menyadari bahwa restorasi kesultanan sangat sulit diwujudkan. Karena itu di hadapan Moh. Hatta, Kertapati segera menyadari kekeliruannya dan menyatakan kesetiaan kepada pemerintahan republik. Secara simbolis Kertapati menyerahkan wilayah Kesultanan Jambi kepada Hatta, sebagai wakil dari pemerintah pusat. Upacara penyerahan dilakukan di Lapangan Rawasari. Iringan penyerahan ditandai dengan sebuah keris yang disimbolkan sebagai pusaka kesultanan diletakkan di atas talam dan dibawa oleh seorang tiga orang putri keraton. Mereka dipayungi dua buah payung kuning. Di belakang mereka diikuti oleh keluarga yang berpakaian adat; turut pula seorang ulama, dan hulu balang yang berpakaian prajurit. Keris diangkat oleh Kertapati dan diserahkan kepada Hatta. Hatta menyalami Kertapati dengan ucapan terima kasih atas kesetiaan rakyat Jambi di dalam negara republik. Prosesi tersebut disaksikan oleh banyak orang tanpa ada yang merasa disudutkan (Nasruddin, 1989: 419; Soedarsono, 1975: 109).

Sikap tenang Hatta dalam menghadapi dinamika politik di beberapa daerah telah menyadarkan banyak tokoh-tokoh untuk tetap menjaga persatuan republik Indonesia. Rakyat Jambi harus banyak belajar menerima keragaman suku bangsa. Posisi penting Hatta di pemerintahan pusat memberikan sumbangan yang meyakinkan pada masa revolusi kemerdekaan. Selama perjuangan menentang Belanda, ia melakukan sejumlah perjalanan penting di Sumatra. Selama enam bulan setelah Agresi Militer I Belanda, Hatta menghabiskan waktunya di Sumatra untuk konsolidasi kekuatan dan menyelesaikan sejumlah polemik antara pemerintah sipil dan militer. Hatta telag memberikan penyelesaian yang penting demi persatuan bangsa (Kahin, 1980: 115).

Antara bulan Juli dan November 1948, Hatta kembali mengunjungi Sumatra. Hatta baru tiba di Jambi pada 5 Desember 1948. Hatta kembali mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga integritas bangsa. Untuk itu, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya berbagai koordinasi di dalam negeri dan diplomasi politik ke luar negeri untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan internasional. Semua upaya tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemerintah pusat pernah mengutus Dr. Soeroso ke Jambi untuk meminta bantuan dana perjuangan, karena perekonomian Jambi relatif kondusif berkat produksi karet yang diekspor ke Singapura (Yanti, 1993; Purwanto, 1992). Kapal-kapal dari Singapura yang membawa tekstil, garam, perabot, dan barang-barang kebutuhan lainnya relatif aman dari blokade pasukan Belanda. Pada tahun 1947, kota Jambi digambarkan bagaikan “sebuah miniatur Singapura”, meskipun tingkat kemakmuran tidak merata di tengah masyarakat. Pendapatan terbesar dari perdagangan ke Singapura paling banyak dinikmati oleh para eksportir Cina, elit administratif, dan militer Elsbeth Locher-scholten, 2004: 335; Soedarsono, 1975: 66).

Menanggapi permintaan dana untuk biaya diplomasi ke luar negeri, Kertapati dan Kolonel Abundjani segera mengumpulkan para eksportir karet dan Persatuan Dagang Tionghoa. Pengusaha-pengusaha Tionghoa yang sempat datang ialah Tjan Lok Ki, Tjiu Hi Liang, Li Chiau Hi, Ki Tjeng Kuan, Li Kong Bi, dan Tjam Sui Mia. Kebetulan bersamaan dengan itu, Perseroan Rakjat Djambi (PERAD), yang bergerak di bidang ekspor dan impor tengah memuat 500 ton karet di pelabuhan untuk diekspor ke Singapura. Direktornya bernama Pasirah Jangtjik. Pertemuan Kolonel Abundjani dan para pengusaha tersebut menyepakati bahwa 450 ton tersebut dibeli secara bersama-sama oleh para pengusaha. Uang pembeliannya diserahkan kepada Dr. Soeroso. Maka terkumpul sumbangan sebesar \$ 380.000; \$ 280.000 berasal dari sumbangan berbagai pihak dan \$ 100.000 berasal dari Kertapati. Sumbangan tersebut diserahkan langsung Abundjani kepada Hatta (Meng, t. th: 22; Nasruddin, 1989: 432; Soedarsono, 1975: 73, 86).

Pada 19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militer II, yang dimulai dari kota-kota penting di Jawa. Setelah itu, Jambi diserang oleh Belanda pada 29 Desember 1948. Sebelum serangan dari udara diluncurkan, Belanda mengedarkan selebaran yang berbunyi “Jangan Bakar Tambang Minyak, Siapa yang Membakar akan Dihukum Berat. Tertanda Jenderal Spoor”. Komandan Sub-Teritorial Djambi Taktik Abundjani justru telah memerintahkan para pejuang agar bumi hanguskan ladang-ladang di Tempino dan Kenali Asam. Tujuannya agar menimbulkan kabut asap hitam untuk menyulitkan serangan udara Belanda (Mansur, 2000: 96). Pukul 13.00 siang, beberapa pesawat tempur Belanda terbang kembali di udara Jambi, sambil diiringi oleh pesawat pengangkut pasukan payung. Konsentrasi pendaratan pasukan payung adalah di dekat tambang-tambang minyak seperti di Paal Merah, Kenali Asam, Bajubang, dan Tempino. Pasukan yang mendarat berhasil mengepung Kota Jambi. Pertempuran sengit terjadi di lapangan terbang Paal Merah, Simpang Jelutung dan Simpang Tiga Sipin. Banyak pejuang dan rakyat sipil yang tertembak, hampir tiga ratus orang yang tewas di hari itu.

Kertapati bersama M. Kamil, M. Syarnubi, Kms. M. Ali, dan Nuskam mengungsi dengan menggunakan speed boat menuju ke arah Dusun Sekernan dan Dusun Rantaumajo. Esok harinya, rombongan staf karesidenan, S. A. Safri dan Sayid Abu Bakat menyusul ke Rantaumajo untuk melaporkan bahwa kota Jambi telah dikuasai oleh Belanda. Safri juga menyampaikan berita duka salah seorang anak Kertapati telah gugur. Selain itu, karena kondisinya yang lemah karena sakit. Kertapati memutuskan untuk balik ke Jambi. Sebelum balik ke Jambi, Kertapati memberikan surat pengunduran dirinya sebagai residen kepada Moh. Kamil. Tampaknya tidak mungkin menjalankan pemerintahan di saat Kota Jambi telah dikuasai oleh Belanda. Sampai di Jambi, Kertapati dikenakan oleh Belanda tahanan di rumah karesidenan, tanpa boleh melakukan komunikasi dengan pejuang (Nasruddin, 1989: 410, 493-494; Soedarsono, 1975: 96).

Peluang untuk melakukan perlawanan berada di hulu Jambi. Komandan STD Abundjani bersama dengan pasukannya telah mengungsi ke hulu Jambi. Moh. Kamil dan rombongan turut mengungsi pula ke hulu Jambi. Seluruh rombongan bertemu di Muara Tebo. Moh. Kamil menunjukkan surat kuasa Kertapati kepada Abundjani. Abundjani memimpin rapat darurat yang memutuskan untuk menyerahkan surat kuasa karesidenan kepada Bachsan Siagian. Residen Bachsan Siagian segera melaporkannya kepada pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Karena Muara Tebo dan Muara Bungo akhirnya dikuasai oleh Belanda, Residen Bachsan menjadikan Rantau Ikil sebagai basis pemerintahan, sedangkan Abundjani dan pasukannya bergerilia di Merangin (Suhelmi: 58; Soedarsono: 107-108; Nasruddin, 1989: 495).

Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 23 Agustus 1949 memutuskan bentuk negara adalah republik Indonesia. Gubernur Militer Sumatra, Dr. A. Gani memerintahkan Kepala Polisi A. Bastari untuk menemui Abundjani yang sedang berada di pengungsian di Jangkat, Merangin, untuk hadir bersama rombongan yang dipimpin oleh Residen Bachsan Siagian bertemu dengan Van Schendel, perwakilan Belanda, di Tembesi. Pertemuan tersebut adalah untuk penyerahan daerah Jambi sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia (Soedarsono, 1975: 146). Tanggal 29 Desember 1949, pasukan Belanda meninggalkan Jambi. Dalam upacara penurunan bendera Belanda dan penaikkan bendera merah putih, inspektur upacara, Kolonel Abundjani, menyampaikan tiga amanat: 1. Kerja sama prajurit dan rakyat telah berhasil mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945; 2. Jangan ada dendam kepada orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Belanda; 3. Marilah kita bersatu membangun ekonomi, pendidikan, dan pertanian untuk mencapai negara yang adil dan makmur (Soedarsono, 1975: 152).

5. CONCLUSIONS (خلاصة \ خاتمة)

5. CONCLUSION

Masyarakat Jambi kesulitan untuk beradaptasi dengan pola baru kepemimpinan baru yang diterapkan Residen Belanda. Fasilitas pendidikan dan kepemimpinan marga yang disiapkan oleh Belanda tidak berhasil membentuk kelompok elit kepemimpinan dan sumber daya yang cakap. Hal ini memaksa Belanda untuk menggunakan orang-orang non-Jambi sebagai tenaga korp kepegawaian dan pejabat-pejabat lokal (demang). Sikap politik Raden Kertapati yang *Jambi-oriented* dengan cara merestorasi kesultanan adalah kontra-produktif cita-cita persatuan negara republik yang baru terbentuk. Untuk itu, rakyat Jambi harus banyak belajar untuk menerima keragaman suku dan siap berkompetisi dengan orang-orang non-Jambi.

6. REFERENCES (قائمة المراجع)

- Anderson, Benedict R. O'G. 2006. *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Jakarta: Equinox Pub, 2006.
- Anonim, 1977/1978. "Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional di Daerah Maluku" (Ambon: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/ 1978)
- Aspinall, Edward, 2009. *Islam and nation: Separatist rebellion in Aceh, Indonesia*. Singapore: NUS Press
- Bafadhal, Fauzi MO., 2008. "Sejarah Sosial Pendidikan Islam di Jambi: Studi Terhadap Madrasah Nurul Iman." *Disertasi* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- _____, 1981/1982. "Madrasah Al-Khairiyah dan Gerakan Hisbullah di Kota Jambi (Studi Kasus Pusat Pendidikan yang Menggerakkan Kekuatan Sosial-Politik dari Th. 1938-1949)," *laporan penelitian* Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Enar, Fatimah dkk., 1978. *Sumatera Barat 1945-1949*. Padang: Pemerintah Daerah Sumatera Barat
- Formichi, Chiara, 2012. *Islam and the Making of Nations: Kartosuwiryo and Political Islam in the 20th Century Indonesia*. Leiden: KITLV Press
- Gullick, M., 1981. "A Condition of Having a Raja: Review of Kerajaan, by A. C Milner." *Review of Indonesian and Malayan Affairs*. 16. 2
- Hoefte, Rosemarijn dan Henk Schulte Nordholt, 2020. *Authoritarian Modernization in Indonesia's Early Independence Period*. Leiden: Brill
- Joshua, Norman. 2018. State and Revolution in the Making of the Indonesian Republic. *Jurnal Sejarah*. Vol. 2(1)
- Kahin, Audrey (ed.). 1985. *Regional Dynamics of the Indonesian Revolution: Unity from Diversity*. Honolulu: University of Hawaii Press
- Kahin, George Mc. T., 2003. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Studies on Southeast Asia, no. 35. Ithaca, N.Y: Southeast Asia Program Publications, Cornell University
- _____, 1995. "Some Recollections and Reflections on the Indonesian Revolution." *Indonesia*, vol. 60. October
- _____, 1980. In Memoriam: Mohammad Hatta (1902-1980). *Indonesia*, vol. 30. October
- Kartodirdjo, Soejatno. 1982. "Revolution in Surakarta 1945-50: A Case Study of City and Village in the Indonesian Revolution." A thesis in The Australian National University, Canberra
- Kementerian Penerangan, 1954. *Sumatera Tengah*. Bukittinggi: Kementerian Penerangan
- Mansur, Brori. 2000. "Medan Laga di Jambi dan Sekitarnya," dalam Anonim, *Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan*, jilid III. Jakarta: Markas Besar Legiun Veteran RI
- Milner, A. C., 1982. *Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule*. Tucson: University of Arizona Press

- Muttalib, Jang A., 1980. "Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial di Jambi pada Perempatan Pertama Abad ke-20," *Prisma*, No. 8 Agustus
- Muzakir, Ali. 2017. Transformasi Pendidikan Islam di Jambi: Dari Madrasah ke Pesantren." *Islam Realitas: Jurnal of Islam Social and Studies*, Vol. 3, No. 1
- Nasruddin, A. Mukty, 1989. "Jambi dalam Sejarah Nusantara 692-1949 M," *monograf*
- Poeze, Harry and Henk Schulte Nordholt. 2024. *Merdeka*. Amsterdam: Amsterdam University Press
- Purnomo, Budi. 2000. "Pembentukan Provinsi Jambi 1946-1958, *disertasi* di Universitas Indonesia
- Reid, Anthony. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- . 1979. *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur, New York: Oxford University Press
- Soedarsono, R., 1975. "Sejarah Perjuangan Daerah Jambi dan Sekitarnya," *monograf*
- Sukarno, 2014. *Mencapai Indonesia Merdeka dalam Dibawah Bendera Revolusi Jilid I*. Jakarta, Yayasan Bung Karno
- Wiyono dkk., 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Zaibaski G., Sofyan dan Hamdani, 2008. *H. M Kamil: Teladan dan Kesederhanaannya Potret Keseharian Seorang Patriot dan Nasionalis Sejati*. Jambi: CV. Horison Grafika
- Zainuddin. R., M. Yuhaldi, dan Bachtiar AS, 1985. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- , 1979/1980. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- , 1980/1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Zed, Mestika. 2005, *Giyugun: Cikal-Bakal Tentara Nasional di Sumatra*. Jakarta: LP3ES
- Zulqaiyyim, 2019. "Profanisasi dan Sakralisasi Ruang Sosial Kota Jambi 1850-an dan 1950-an." *disertasi* di Universitas Gajah Mada
- <https://www.uisu.ac.id/opini-dosen-revolusi-sosial-di-kesultanan-langkat-dahlana-sari-marbun/>
- Ms., "Ini Sajarah Kerajaan Jambi." foto copy koleksi Ratu Mas Zahara
- MS., "Silsilah (Raja-raja) Jambi Or. 2304 f," <http://hdl.handle.net/1887.1/item:2371844>